# UJIAN AKHIR SEMESTER
# PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAAN

**DISUSUN OLEH:**

**VIKRY ARRDIANSYA**

**(NIM:51924144)**

**DESAIN KOMUNIKASI VISUAL**

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

**TAHUN 2025**

# Daftar Isi

1. **Pentingnya Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi.**.....1
2. **Prinsip-Prinsip Dan Nilai Demokrasi**.....1
3. **Sebutkan Dan Jelaskan Empat (4) Landasan Pembangunan Nasional**.....3
4. **Salah Satu Bentuk Pendidikan Kewarganegaraan Adalah Identitas Nasional. Berikan Pandangan Anda Terkait Dengan Dinamika Dan Tantangan Identitas Nasional di Indonesia Beserta Contoh Kasusnya.**.....4
5. **Resume jurnal kelompok**.....5

## 1. Pentingnya Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar mahasiswa memiliki pandangan terhadap nilai-nilai HAM, mampu berpartisipasi dalam memecahkan persoalan tanpa menimbulkan konflik, dan berpikir kritis. Pendidikan Kewarganegaraan juga dimaksudkan agar mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis, dan ikhlas sebagai warga negara terdidik. Tujuan umum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah menumbuhkembangkan kesadaran eksistensial kewarganegaraan mahasiswa sebagai warga NKRI. Ini dilakukan melalui pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan, serta mengembangkan wawasan dan memantapkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasi membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum tujuan kewarganegaraan diperguruan tinggi adalah mengembangkan kesadaran eksistensial kewarganegaraan mahasiswa sebagai warga NKRI yang hidup ditengah warga di dunia dengan segala implikasi dan konsekuensi nya, melalui Pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan mahasiswa pengembangan wawasan dan memantapkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas penghargaan dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dan menurut pendapat, Pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting untuk membentuk karakter seorang mahasiswa agar memiliki sifat dan sikap yang baik dan berguna untuk bangsa dan masyarakat, karena sebaik-baiknya mahasiswa adalah mahasiswa yang berguna bagi Masyarakat dan negaranya.

## 2. Prinsip-Prinsip Dan Nilai Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "dēmokratía" yang berarti "kekuasaan rakyat", terbentuk dari kata "dêmos" (rakyat) dan "Kratos" (kekuasaan). Sistem politik ini muncul pada **pertengahan** abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena. Pengertian “*the government from the people, by people and*

*for the people".* Secara terminologi, demokrasi memiliki banyak pandangan dan tidak ada definisi tunggal. Demokrasi dapat dipandang sebagai bentuk pemerintahan, sistem politik, atau pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsipnya.

Prinsip-prinsip demokrasi.

- ***Freedom/equality***
  *Freedom/Equality* (Kebebasan/Persamaan) adalah dua konsep yang saling terkait dan sering dianggap sebagai dasar dari sistem demokrasi. Freedom (kebebasan) mengacu pada hak individu untuk bertindak, berbicara, dan berpikir tanpa adanya batasan atau pengekangan yang tidak perlu. Sedangkan Equality (persamaan) mengacu pada kondisi di mana semua individu memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, jenis kelamin, ras, agama, atau faktor-faktor lainnya.
- ***People's sovereignty***
  *People's sovereignty* (Kedaulatan rakyat), juga dikenal sebagai kedaulatan rakyat, adalah prinsip bahwa otoritas suatu negara dan pemerintahannya diciptakan dan dipertahankan atas persetujuan rakyatnya, melalui perwakilan yang mereka pilih (pemerintahan oleh rakyat). Ini berarti rakyat adalah sumber kekuasaan politik tertinggi.
- **Pemerintahan Berdasarkan Hukum (*Rule of Low*)**
  demokrasi menuntut bahwa semua warga negara, termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Tidak ada yang kebal terhadap hukum, dan hukum berlaku setara untuk semua. ini juga termasuk prinsip *due process of low* (proses hukum yang adil).
- **Pemilihan kekuasaaan (*separation of powers*).**
  untuk mencegah otoritarianisme, kekuasaan negara harus dipisahkan ke dalam tiga lembaga: legislative, eksekutif, yudikatif. Masing-masing saling mengawasi (*checks and ballances*).

Nilai-nilai Demokrasi.

- **Penyelesaian Perselisihan Secara Damai Dan Melembaga.**
  Demokrasi mengedepankan dialog, musyawarah, dan lembaga formal (pengadilan, parlemen) untuk menyelesaikan konflik, bukan kekerasan.
- **Perubahan secara Teratur dan Damai.**

Demokrasi memungkinkan pergantian kekuasaan secara teratur tanpa kekerasan, melalui pemilu atau mekanisme hukum.

- **Pembatasan Kekuasaan**
  Demokrasi menolak kekuasaan absolut. Kekuasaan yang tidak dikontrol akan cenderung korup. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan transparansi.
- **Pengakuan atas Pluralitas**
  Demokrasi menghormati keanekaragaman budaya, agama, suku, dan pendapat. Minoritas tetap dilindungi meskipun keputusan berdasarkan suara mayoritas.
- **Keadilan Sosial**
  Demokrasi mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan keadilan hukum. Negara harus aktif mencegah ketimpangan ekstrem.

## 3. Sebutkan Dan Jelaskan Empat (4) Landasan Pembangunan Nasional

Landasan pembangunan nasional di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman moral dan nilai-nilai dalam seluruh aspek pembangunan. UUD 1945, khususnya Pembukaan dan pasal-pasalnya, memberikan tujuan dan arah pembangunan nasional.

Empat (4) landasan pembangunan nasional:

- **Landasan Konstitusional:**
  UUD 1945, terutama bagian pembukaan, memuat tujuan negara yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional. Tujuan tersebut meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- **Pancasila sebagai Landasan Idiil:**
  Pancasila, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, menjadi landasan ideologis yang menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan

keadilan sosial menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

- **Landasan Operasional:**
  Selain Pancasila dan UUD 1945, ada juga landasan operasional pembangunan, seperti, Ketetapan MPR: Terutama yang berkaitan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional dalam periode tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM): Menjabarkan program-program pembangunan yang lebih terperinci untuk jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Pemerintah (RKP): Merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan setiap tahun.
- **Landasan Visional:**
  Landasan Visional merujuk pada pandangan jangka panjang yang menjadi dasar dalam merumuskan arah, tujuan, dan kebijakan pembangunan suatu negara atau organisasi. Landasan ini berfokus pada cita-cita atau visi yang ingin dicapai di masa depan, dan berfungsi sebagai pedoman untuk merancang langkah-langkah strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Visi jangka Panjang, Visi ini memberikan arah yang jelas bagi seluruh elemen masyarakat atau pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Ini memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan tujuan besar yang ingin dicapai. Landasan visional juga mencakup nilai-nilai dasar dan tujuan moral yang ingin dijunjung tinggi dalam proses pembangunan. Hal ini membantu menjaga integritas dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Secara sederhana, landasan visional adalah panduan yang memberi arah dan tujuan bagi pembangunan jangka panjang, dengan mengedepankan cita-cita dan nilai-nilai luhur sebagai landasan dasar dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

## 4. Salah Satu Bentuk Pendidikan Kewarganegaraan Adalah Identitas Nasional. Berikan Pandangan Anda Terkait Dengan Dinamika Dan Tantangan Identitas Nasional di Indonesia Beserta Contoh Kasusnya.

Pemilih muda pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung tahun 2019 adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Kontribusi pemilih muda dalam bidang politik desa berlandaskan atas peran pemuda sebagai Agen controlling. Pemilih muda terutama di desa dapat memberikan wawasan kepada masyarakat desa terkait pemilihan kepala desa agar masyarakat dapat turut aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa guna meminimalisir golput. Peran pendidikan politik bagi pemilih muda sangat penting untuk dilaksanakan dalam mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung Tahun 2019.

Berdasarkan artikel karya Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si. yang berjudul *"Pendidikan Politik Pemilih Muda dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung Tahun 2019"*, identitas nasional secara implisit dikaitkan dengan peran generasi muda dalam sistem demokrasi dan proses politik, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa (pilkades). menegaskan bahwa pemilih muda memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Mereka adalah generasi yang akan memimpin Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045, sehingga kesadaran politik dan keterlibatan aktif mereka mencerminkan identitas nasional yang progresif dan partisipatif. Identitas nasional tidak hanya ditentukan oleh asal-usul etnis atau budaya, tetapi juga oleh kesadaran politik, sikap kritis, dan kemampuan berpartisipasi dalam demokrasi. Pendidikan politik yang diberikan kepada generasi muda bertujuan untuk:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- Membangun **kesatuan bangsa** dan mencegah disintegrasi melalui pemilu yang sehat dan adil.

Ini menunjukkan bahwa identitas nasional juga dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial-politik.

Pandangan tentang identitas nasional dalam artikel ini menekankan bahwa generasi muda merupakan penentu arah bangsa melalui keterlibatan aktif dalam politik yang cerdas, jujur, dan demokratis. Pendidikan politik berfungsi sebagai wahana membentuk warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta sebagai agen pembaharu dalam membangun Indonesia yang lebih baik. (Kurniasih, 2020)

# 5. Resume jurnal kelompok

## Korupsi Pertamina Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia

51924121_Putri Bunga Nayla, 51924137_Arva Ferdinansyah Halik,

51924128_Aria Rahman, and 51924144_Vikry Ardiansyah

1. Pendahuluan

Korupsi adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya pembangunan, terlebih lagi ketika terjadi pada lembaga atau perusahaan milik negara yang memiliki peran strategis, seperti Pertamina. Sebagai BUMN yang beroperasi di sektor energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina seperti pengadaan minyak, penyalahgunaan wewenang, hingga pengelolaan anggaran proyekmenjadi gambaran buruk dari tata kelola yang tidak baik. Ini pada akhirnya menyebabkan kerugian negara dan ketidakadilan sosial yang merugikan rakyat Indonesia.

Dengan adanya persoalan ini, sangat penting bagi kita untuk mendesak reformasi yang lebih tegas dan transparan di sektor BUMN, termasuk di dalamnya Pertamina. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas agar perusahaan-perusahaan milik negara dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat Indonesia.

2. tinjauan Pustaka
    1. Korupsi BUMN dan Dampaknya:
       Korupsi di Pertamina, sebagai BUMN energi strategis, menjadi tantangan besar bagi pembangunan Indonesia. Kasus seperti pengadaan minyak dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan tata kelola buruk, merugikan negara, dan menghambat terwujudnya sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Kerugian akibat korupsi Pertamina bahkan dapat mencapai triliunan rupiah.
    2. Korupsi dan Keadilan Sosial:
       Korupsi Pertamina tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mengganggu keadilan sosial. Masyarakat menganggap korupsi ini sistemik dan mencederai nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pihak yang paling dirugikan adalah negara, masyarakat miskin, dan konsumen energi.
    3. Metode Penelitian Persepsi Publik:
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei daring dengan accidental sampling. Kuesioner berisikan 5 pertanyaan mengenai pengetahuan, persepsi, nilai Pancasila, dan solusi. Hasil survei menunjukkan 100% responden mengetahui kasus korupsi Pertamina dan menganggapnya bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila. Sebanyak 71,4% responden menilai korupsi Pertamina "Sangat Berdampak" pada masyarakat umum.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil dari survey dari penelitian jurnal kelompok kami menyebutkan bahwa:

- 100% orang dari yang mengisi forum mengetahui adanya korupsi di pertamina.
- 71,4% orang yang mengisi forum mengatakan bahwa kasus ini sangat berdampak bagi Masyarakat umum dan 28,6% mengatakan cukup berdampak.
- 52,4% orang mengatakan bahwa negara adalah yang paling dirugikan, 28,6% Masyarakat yang dirugikan, dan 19% konsumen BBM yang dirugikan.
- 70% orang mengatakan bahwa pencegahan paling efektif adalah pengawasan tepat Lembaga independent, 20% mengatakan hukuman yang tegas, dan 10% mengatakan transparansi anggaran dan laporan.

- 100% orang mengatakan bahwa korupsi pertamina bertentangan dengan sila ke-5.

Inilah hasil survey dari beberapa narasumber yang mengisi forum penelitian kami.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak signifikan terhadap terganggunya realisasi keadilan sosial di Indonesia. Persepsi masyarakat menunjukkan bahwa praktik korupsi di Pertamina dianggap sebagai fenomena sistemik yang mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya transparansi di lingkungan BUMN. Selain itu, korupsi di sektor strategis seperti energi juga dinilai mencederai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan BUMN, serta peningkatan keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya perusahaan negara, agar prinsip keadilan sosial dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik bernegara.

# Bibliography


Fitriani, F. F. (2025). *Kerugian Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rp193,7 Triliun, Ini Perinciannya!* KABAR24.

Grehenson, G. (2025). *Korupsi di Pertamina Terus Terulang, Pakar UGM Desak Reformasi Struktural.* UGM.

lpm.uinsyahada.ac.id. (2025). *Korupsi Pertamina dan Prinsip Maslahah.* UIN.

Mardiana, A. (2025). *Kronologi Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara Hingga Rp 200 Triliun.* Katadata.

metrotv. (n.d.). korupsi.

money.kompas.com. (2025). *Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Siapa yang Rugi?* KOMPAS.

Tempo. (2025). *Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi.* www.tempo.co.

www.idntimes.com. (2025). *Apa Dampak Korupsi Minyak Pertamina ke Konsumen dan Negara?* IDNTIMES.

www.kompas.com. (2025). *Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun, Bagaimana Awal Kasus Ini Terungkap?* Kompas .

www.kompas.id. (2025). *Skandal Minyak Pertamina: Bagaimana Kronologi dan Apa Dampaknya?* Kompas.

www.tempo.co. (2025). *Rupa-rupa Korupsi 2025: Korupsi Pertamina, Korupsi Minyak Goreng, sampai Korupsi Sampah.* Tempo.